



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG
APRIL TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karunia serta Ridho-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 telah dapat tersusun. Penyusunan dokumen Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini merupakan gambaran yang akan dijadikan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menjalankan program kerja selama 1 (satu) tahun, sehingga apa yang direncanakan dapat terwujud.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan dokumen Renja ini serta besar harapan kami semoga Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami sehingga tersusunnya Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Padang Panjang, Juni 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



Pembina Tk. I / NIP. 19840402 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN BERKENAAN

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	21
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	25
3.3	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	28

BAB IV	PENUTUP	33
--------	---------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Renja-PD merupakan acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah dan merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renja-PD Perubahan memuat hasil evaluasi Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I, dan memuat tujuan dan sasaran Renja-PD serta program dan kegiatan perubahan pada tahun berkenaan.

Dengan demikian Renja-PD Perubahan pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra dan merupakan salah satu dari komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja-PD Perubahan dalam tahun berkenaan dilakukan pengukuran kinerja triwulan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD sebagaimana diamanatkan dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi : (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD dan/atau (b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berkenaan, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan atas hasil evaluasi Renja-PD pada Triwulan I yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi terkait pelaksanaan program/kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);

16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Negara Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 9);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berkenaan, guna menyikapi perkembangan keadaan yang yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD sesuai dengan Renja sebelumnya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah guna mengarahkan kembali seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2025 dapat terencana dan berkenaan dengan baik sesuai dengan perkembangan keadaan yang terjadi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I dengan menjelaskan penyebab program/kegiatan/subkegiatan yang tidak mencapai target dan melebihi target serta faktor penghambat dan faktor pendorong.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional/provinsi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, kegiatan dan sub kegiatan.

Bab IV Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh OPD dan permasalahan permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun berkenaan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Kualitas Renja-PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sudah disusun berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan keuangan daerah. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun anggaran 2025 terdiri dari 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapai/ terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Program Kegiatan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada periode renstra Tahun 2024 -2026 memiliki 2 sasaran strategis, dengan capaian kinerja secara umum baik, dengan capaian kinerja 100%.

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja ini dapat tercapai dengan beberapa langkah yang dilaksanakan:

1. Pelaksanaan operasi tim gabungan Penegakkan Perda berupa tim SK4 yang melibatkan unsur TNI Polri dan instansi vertikal lainnya
2. Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan pelajar
3. Perekrutan tenaga harian lepas (THL) untuk Banpol PP dan Petugas Pemadam Kebakaran yang membantu dalam pelaksanaan operasional lapangan
4. Kesiapsiagaan dari anggota operasional pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas

Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Tahun bekenaan 2025 meliputi indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program/ Kegiatan dan realisasi pelaksanaan. Untuk mengetahui pelaksanaan Renja tahun 2025 berjalan maka dilakukan pengukuran dan evaluasi Renja dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yang tergambar dalam Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	2			3			4			5			6			7			8=5+7			9		
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				29.364.777.780		11.932.322.299		11.973.657.998		2.606.147.309		14.538.469.608		49,51%									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	15.729.618.580	100 Persen	6.595.194.649	100%	6.841.281.698	35%	1.690.653.509	100 Persen	8.285.848.158	100 Persen	52,68%												
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Persen	13.165.485.990	82 Persen	5.654.678.751	90%	5.333.431.498	35%	1.564.864.772				82 Persen	7.219.543.523		54,84%									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1722 Orang/bulan	13.165.485.990	688 Orang/bulan	5.654.678.751	574 Orang/bulan	5.333.431.498	242 Orang/bulan	1.564.864.772				930 Orang/bulan	7.219.543.523		54,84%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	60.000.000	100 Persen	98.685.000	100%	-	-	-				100 Persen	98.685.000		164,48%									
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80 Paket	60.000.000	221 Paket	98.685.000	174 Paket	-	-	-				221 Paket	98.685.000		164,48%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	570.819.950	88 Persen	238.345.864	90%	242.195.200	30%	40.008.762				88 Persen	278.354.626		48,76%									
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	10.069.950	4 paket	2.968.400	4 paket	3.162.000	1 paket	315.900				5 paket	3.284.300		32,61%									
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	120.000.000	4 paket	16.748.500	12 paket	23.966.700	1 paket	2.622.000				5 paket	19.370.500		16,14%									
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36 paket	40.000.000	5 paket	11.110.300	5 paket	15.079.500	1 paket	2.436.100				6 paket	13.546.400		33,87%									

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	400.750.000	62 laporan	207.518.664	15 laporan	199.987.000	16 laporan	34.634.762	78 laporan	242.153.426	78 laporan	60,43%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	90%	110.000.000	-	-	90%	Rp141.872.600	-	Rp	-	-	-	0,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	9 unit	110.000.000	-	-	2 unit	141.872.600	-	-	-	-	-	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 Persen	324.640.240	90 Persen	120.838.284	90%	132.432.000	30%	24.415.475	90 Persen	145.253.759	90 Persen	44,74%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	16.000.000	7 Laporan	2.950.000	12 Laporan	4.148.000	-	-	7 Laporan	2.950.000	7 Laporan	18,44%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	89.760.240	36 Laporan	20.560.076	36 Laporan	35.384.000	9 Laporan	4.549.675	45 Laporan	25.109.751	45 Laporan	27,97%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	218.880.000	14 Laporan	97.328.208	12 Laporan	92.900.000	3 Laporan	19.665.800	17 Laporan	117.194.008	17 Laporan	53,54%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	90 Persen	1.498.672.400	90 Persen	482.646.750	90%	991.350.400	30%	61.364.500	90 Persen	544.011.250	90 Persen	36,30%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	78 Unit	1.138.036.400	26 Unit	397.602.760	26 Unit	762.915.000	7 Unit	50.465.500	33 Unit	448.068.250	33 Unit	39,37%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	150.000.000	30 Unit	13.909.000	30 Unit	27.557.200	6 Unit	2.000.000	36 Unit	15.909.000	36 Unit	10,61%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	210.636.000	2 Unit	71.135.000	2 Unit	200.878.200	2 Unit	8.899.000	4 Unit	80.034.000	4 Unit	38,00%
	PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 Persen	9.476.818.000	100 Persen	4.252.673.364	100%	4.161.774.000	30%	815.530.600	100 Persen	5.068.203.964	100 Persen	53,48%
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Penanganan Gangguan Ketertamanan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	8 operasi	9.121.520.000	3 operasi	4.024.098.364	3 operasi	3.881.788.800	3 operasi	786.545.600	3 operasi	4.810.643.964	3 operasi	52,74%

	Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	297.663.230	0	-	0	-	18 laporan	786.545.600	120 laporan	297.663.230	2 Dokumen	74,42%
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	165 laporan	8.411.520.000	102 laporan	3.726.435.134	55 laporan	3.796.248.000	55 laporan	3.796.248.000	18 laporan	786.545.600	120 laporan	4.512.980.734	120 laporan	53,65%
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Pengakuan Perda dan Perkada	24 laporan	90.000.000	-	-	8 laporan	15.000.000	8 laporan	15.000.000	2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	0,00%
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	3 unit	90.000.000	-	-	5 unit	70.540.000	-	70.540.000	-	-	-	-	-	0,00%
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 kasus	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wal Kota	Jumlah operasi penegakan Perda	4 operasi	205.298.000	4 operasi	226.575.000	2 operasi	279.985.200	2 operasi	279.985.200	1 operasi	28.985.000	4 operasi	257.560.000	4 operasi	87,22%
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan	60.000.000	-	-	1 Laporan	10.045.200	-	10.045.200	-	-	-	-	-	0,00%
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Sesuai SOP	20 Laporan	235.298.000	8 Laporan	226.575.000	8 Laporan	269.940.000	8 Laporan	269.940.000	2 Laporan	28.985.000	10 Laporan	257.560.000	10 Laporan	109,46%
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	3 kegiatan	60.000.000	-	-	2 operasi	970.602.300	-	970.602.300	-	-	-	-	-	0,00%

	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	60.000.000	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	0,00%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktulanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	4.158.341.200	4 Menit	1.084.454.286	10 Menit	10 Menit	970.602.300	4 Menit	99.963.200	4 Menit	1.184.417.486	4 Menit	28,48%
Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	11 kegiatan	3.801.341.200	1 kegiatan	1.028.429.136	2 kegiatan	2 kegiatan	773.182.800	1 kegiatan	99.963.200	1 kegiatan	1.128.392.336	1 kegiatan	29,68%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	45 Laporan	3.416.341.200	12 Laporan	1.028.429.136	15 Laporan	15 Laporan	682.052.800	4 Laporan	99.963.200	16 Laporan	1.128.392.336	16 Laporan	33,03%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	18 Unit	185.000.000	-	-	15 unit	15 unit	91.130.000	-	-	-	-	-	0,00%
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	6 orang	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	80 keluarga	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan	3 kegiatan	205.000.000	1 kegiatan	49.586.100	2 kegiatan	2 kegiatan	105.239.500	-	-	1 kegiatan	49.586.100	1 kegiatan	24,19%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	100 orang	70.000.000	-	-	50 orang	50 orang	60.008.000	-	-	-	-	-	0,00%

	Pemberitahuan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah/Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	48 kelurahan	135.000.000	16 kelurahan	49.586.100	16 kelurahan	49.586.100	16 kelurahan	36,73%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Perselitanse pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 Porsen	152.000.000	100 Porsen	6.439.050	100 Porsen	6.439.050	100 Porsen	4,24%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	36 Laporan	77.000.000	134 Laporan	6.439.050	137 Laporan	6.439.050	137 Laporan	8,36%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi/ Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	5 unit	75.000.000	-	-	-	-	-	0,00%
				29.364.777.760		11.932.322.299		11.973.657.998	2.606.147.309	49,51%

Berdasarkan tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan ke I Tahun 2025, berikut analisis dari tabel tersebut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, beberapa kegiatan yang menunjang sasaran kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai anggaran kas. Terdapat beberapa sub kegiatan yang masih belum atau tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini dampak pengurangan anggaran atas difocusing.
2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, beberapa kegiatan yang menunjang sasaran kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai anggaran kas. Terdapat 3 sub kegiatan yang masih belum atau tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini kena dampak pengurangan anggaran atas difocusing.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamata Kebakaran dan Penelamatan Non Kebakaran beberapa kegiatan yang menunjang sasaran kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai anggaran kas. Terdapat 3 sub kegiatan yang masih belum atau tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini kena dampak pengurangan anggaran atas difocusing

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seluruh program kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk tahun 2018-2023 (Berdasarkan Perubahan Renstra tahun 2018-2023) dicapai dengan sasaran yakni :

1. ***Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah***
2. ***Meningkatkan cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran***

Sedangkan untuk tahun 2024 (Berdasarkan Renstra 2024-2026) dicapai dengan sasaran yakni :

1. ***Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan pencegahan perda***
2. ***Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran***

Target evaluasi capaian kinerja untuk 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kota Padang Panjang s.d Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Renstra Perubahan 2018-2023										
1	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum				100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penegakkan Perda				100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK				100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah				10 menit	3 menit		10 menit	2 menit	100%
Renstra RPD 2024-2026										
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%						
2	Persentase Penegakkan Perda	100%	100%	100%						
3	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	100%						
4	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 menit	4 menit	100%						

Sumber... Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Dari tabel 2.2 dapat dilihat capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam rentang 3 tahun terakhir yaitu dari

tahun 2022 s/d 2024. Pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdapat beberapa indikator yang menggambarkan pelayanan terkait urusan tersebut. Diantaranya adalah indikator Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum dicapai melalui penanganan atas pengadun pelanggaran yang ditangani, dimana untuk Tahun 2020-2023 dapat diselesaikan sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100% dari jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk. Begitu juga Tahun 2024 indikator urusan ketentraman dan ketertiban umum ada perubahan indikator kinerja berdasarkan Renstra PD 2022-2024 yaitu indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Artinya seluruh pengaduan atau pelanggaran yang masuk dapat ditangani atau ditanggulangi 100% dari jumlah pelanggaran atau gangguan Trantibum yang terjadi. Hal ini menunjukkan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menanggulangi berbagai gangguan trantibum yang terjadi di daerah. Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, peningkatan patroli dan pengawasan, dan tokoh masyarakat membantu dalam pengumpulan informasi, penanganan kasus, serta sosialisasi peraturan daerah terkait trantibum serta penggunaan teknologi dalam penanganan kasus trantibum.

Hal ini beriringan dengan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Artinya seluruh masyarakat kota Padang Panjang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada. Dari jumlah kejadian pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 semuanya terlayani sesuai target. Indikator ini merupakan pemenuhan SPM terkait bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Untuk indikator Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dari Tahun 2022 s/d 2024 sebesar 100% dari jumlah layanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kota Padang Panjang dalam tingkat waktu tanggap oleh Satpol PP dan Damkar ditambah jumlah layanan pemadaman di Kota Padang Panjang dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan Satpol PP dan Damkar dari jumlah jumlah kejdian kebakaran di Kota Padang Panjang.

Untuk indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran, yang ditargetkan 10 menit tercapai 3 menit dari rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadam kebakaran dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Dari indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal berupa: layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi semuanya telaksana dengan baik

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.

1. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pengawasan, penertiban dan penindakan sehingga terwujud peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Dalam pencapaian suasana tentram dan tertib di masyarakat ada beberapa kendala antara lain :
 - a. Peran serta dan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan termasuk lembaga adat guna terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. Masih adanya pelanggaran di fasilitas umum dan fasilitas sosial terutama pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bermobil, gepeng, anak jalanan, kelompok funk, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pesatnya perkembangan pembangunan dan peningkatan penduduk di Kota Padang Panjang sudah barang tentu positif dan negatif termasuk berakibat kepada penyediaan perumahan, jaminan kelayakan berusaha yang menimbulkan dampak masalah sosial yang memungkinkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, apalagi seringnya berpindah – pindah tempat .
 - d. Fungsi pembinaan dan pemberdayagunaan masyarakat terutama lembaga-lembaga adat belum mendukung ketentraman dan ketertiban secara optimal.
 - e. Wilayah Kota Padang panjang yang termasuk kepada wilayah dengan kategori rawan bencana alam.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur.
2. Masih belum mencukupi sarana dan prasarana.
3. Masih perlunya penambahan anggaran.

Permasalahan yang ada perlu ditindak lanjuti dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang sebelumnya responsive menjadi preventif, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelayanan bahaya kebakaran. Adapun tantangan dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia.
2. Belum adanya peta rawan bencana
3. Jumlah penduduk yang heterogen berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

1. Koordinasi yang baik antar instansi dimana dengan terjalinnya koordinasi yang baik antar dinas/badan/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Pemanfaatan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

3. Kerjasama dengan pihak luar.

Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Padang Panjang.

4. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung tupoksi.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemadam Kebakaran. Dalam pelaksanaannya terdapat isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian, isu-isu strategis yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat:

1. Penyempurnaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus menjadi perhatian khusus, karena Perda dan Perkada adalah landasan yang menjadi titik tolak Polisi Pamong Praja menentukan arah bertindak.;
2. Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja terutama PPNS dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pemadam kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dan Pemadam Kebakaran;
3. Letak geografis Kota Padang Panjang yang berada diperlintasan didukung dengan potensi wisata yang ada di Kota Padang Panjang meningkatkan geliat perekonomian masyarakat disertai bertambahnya jumlah pengunjung ke Kota Padang Panjang berbanding lurus dengan potensi pelanggaran Perda dan trantibum.
4. Perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan..
5. Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), merupakan salah satu indikator pada standar pelayanan minimal. Kepadatan dan kerapatan rumah penduduk dapat memperlambat waktu tanggap layanan WMK, walaupun jarak tempuh tergolong dekat;

Dukungan peralatan pemadam kebakaran yang memadai dan memenuhi syarat akan sangat berpengaruh kepada tingkat keberhasilan upaya pemadaman dan sekaligus mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja bagi petugas pemadam kebakaran yang sedang bertugas dalam proses pemadaman.

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, trantibum, dan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Kurangnya kualitas dan kuantitas personil Satpol PP dan satlinmas
			Kurangnya sarana dan prasarana Satpol PP
			Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penegakan perda
			Kurangnya komitmen mitra kerja tentang trantibum
			Kurangnya komitmen penggagas perda
		Respon time yang masih tinggi	Jalan yang kecil dan sulit untuk di akses oleh kendaraan pemadam
			Padatnya perumahan
			Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran & rescue
			Kurangnya keterampilan teknis personil pemadam kebakaran & rescue
			Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan instansi/lembaga tentang penanggulangan dan pencegahan kebakaran dan non kebakaran
			Belum optimalnya koordinasi antar lembaga/OPD

Sumber... Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

Kebijakan Nasional Satpol PP dan Damkar yang tertuang dalam Renstra 2024-2026 diarahkan untuk meningkatkan peran strategis kedua lembaga ini dalam mendukung ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Kebutuhan untuk merespons tantangan yang semakin kompleks, seperti peningkatan konflik sosial, urbanisasi, risiko bencana, dan tuntutan terhadap pelayanan publik yang lebih profesional dan humanis. Secara umum, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mendorong digitalisasi layanan, serta membangun sistem kolaboratif antara pusat dan daerah.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran dan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil. Masih banyak satuan Satpol PP dan Damkar yang kekurangan personel terlatih serta minim peralatan standar. Selain itu, lemahnya koordinasi lintas sektor dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi kendala dalam mewujudkan sistem penanganan ketertiban dan kebencanaan yang efektif. Di sisi lain, kritik terhadap pendekatan Satpol PP yang cenderung represif dalam menangani

pelanggaran, seperti penertiban pedagang kaki lima, menunjukkan perlunya perubahan paradigma ke arah yang lebih humanis dan berbasis hak asasi manusia.

3.1.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu *“Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan”*, dengan penjabaran misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara’– Syara’ Basandi	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan

Misi	Tujuan	Sasaran
Kitabullah		perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu: ***“Transformasi Sektor Strategis yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi membantu Walikota melaksanakan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Tujuan pelayanan yang ditetapkan oleh pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam Renstra Tahun 2024-2026 adalah mengacu pada tujuan dalam RPD Tahun 2024-2026.

Penjabaran tujuan dan sasaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut: "Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat".

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Padang Panjang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk tujuan dan sasaran selama kurun waktu tiga tahun kedepan.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel 3.2
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

NO.	SASARAN RPD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
						2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum	operasi penanganan gangguan trantibum yang merupakan tindakan preferitif dan represif	100%	100%	100%
		Terwujudnya ketertarikan dan keteertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat		Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertarikan dan ketertiban umum	Jumlah Pelanggaran Perda dan Trantibum yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah Pelanggaran Perda dan Trantibum yang diselesaikan yang dilaporkan/ terpantau dikali seratus persen (OPD terkait, PU, Perkim, DKK, BPKD, Dinas Pendidikan)	100%	100%	100%
			1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penegakan PERDA	Jumlah Pelanggaran Perda dan atau Perkada yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah Pelanggaran Perda dan atau Perkada yang diselesaikan yang dilaporkan/ terpantau dikali seratus persen	100%	100%	100%
			Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	Jumlah kejadian kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 10 menit dibagi jumlah kejadian kebakaran dalam jangkauan WMK dikali seratus Persen	100%	100%	100%

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program adalah instrumen kebijakan dari beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:

- Pencapaian visi misi kepala daerah apabila dikaitkan dengan visi dan misi Walikota Padang Panjang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi Perangkat Daerah pendukung dalam pencapaian misi ke-2 pembangunan Kota Padang Panjang yakni *"Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya"* dengan tujuan *"Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis."* Sasaran yang ditentukan yakni *Meningkatnya ketentraman dan ketertiban* umum dengan strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Arah kebijakan yang ditentukan Gerakan Sadar dan Taat Aturan dengan indikator kinerja sasaran Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi :
 1. Jumlah Program dan kegiatan :

Adapun jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebanyak 3 program dan sebanyak 10 kegiatan serta 19 sub kegiatan.
 2. Penyebaran lokasi program dan kegiatan :

Semua program dan kegiatan tersebut berada dilingkungan wilayah Kota Padang Panjang
 3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya (APBD/APBN)

b. Penjelasan jika rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun

2025 awal yang meliputi 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan sebab :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - 2) Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 1) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- b. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
- 1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan dalam hal ini terkait realisasi dan capaian pada triwulan I, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap realisasi target pelaksanaan program/kegiatan dan berakibat terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran. .

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang Tahun 2025 (SPD)

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				11.973.657.998					11.484.539.832		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.973.657.998					11.484.539.832		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.973.657.998					11.484.539.832		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 Persen	6.941.281.598	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 Persen	6.653.297.632		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	90 Persen	5.333.431.498	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	90 Persen	5.339.573.852		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/bulan	5.333.431.498	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/bulan	5.839.973.852		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			
	Pengadaan Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Pengadaan Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapan				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	90 Persen	141.872.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	90 Persen	35.593.900		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	141.872.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	35.593.900		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	242.195.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	142.716.340		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.162.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4.287.300		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	23.966.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	23.828.940		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	15.079.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	14.769.660		

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	199.987.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	99.830.440
X.XX.01.2.07.0005	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 Persen	132.432.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 Persen	119.102.140
X.XX.01.2.07.0006	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.148.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.843.700
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	35.384.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	19.667.240
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	92.900.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.391.200
X.XX.01.2.08.0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkategori baik	90 Persen	991.350.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkategori baik	90 Persen	515.911.400
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	762.915.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	448.331.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	27.557.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	16.508.400
X.XX.01.2.09.0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.878.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	51.072.000
X.XX.01.2.09.0006	PROGRAM PENINGKATAN KETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Padang Panjang	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 Persen	4.161.774.000	PROGRAM PENINGKATAN KETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Padang Panjang	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 Persen	3.977.263.900
X.XX.01.2.09.0011	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	3 operasi	3.881.788.800	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	3 operasi	3.643.226.400
5.01.02	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	-	0	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	-	0
5.01.02.2.01	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	55 laporan	3.796.248.800	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	55 laporan	3.639.726.400
5.01.02.2.01.0002	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	5 laporan	15.000.000	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	5 laporan	3.500.000
5.01.02.2.01.0005	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertarikan dan ketertiban umum	Kota Padang Panjang	Jumlah sarana dan prasarana ketertarikan dan ketertiban umum yang tersedia	5 unit	70.540.000	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertarikan dan ketertiban umum	Kota Padang Panjang	Jumlah sarana dan prasarana ketertarikan dan ketertiban umum yang tersedia	-	0

5.01.02.2.01.0002	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah operasi penegakan Perda	1 operasi	279.985.200	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah operasi penegakan Perda	1 operasi	334.037.500
5.01.02.2.02	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	10.045.200	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	0
5.01.02.2.02.0001	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Sesuai SOP	8 Laporan	269.940.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Sesuai SOP	2 Laporan	334.037.500
5.01.02.2.03	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Kegiatan Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	-	0	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Kegiatan Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	-	0
5.01.02.2.03.0003	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	-	0	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	-	0
5.01.02.2.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Padang Panjang	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	970.602.300	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Padang Panjang	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	953.978.300
5.01.02.2.04.0001	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kabakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	2 kegiatan	773.182.800	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kabakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	2 kegiatan	799.524.700
5.01.03	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Pelugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah	15 Laporan	992.052.600	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Pelugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	520.349.000
5.01.03.2.01	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Kota Padang Panjang	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	-	0	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Kota Padang Panjang	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	-	0
5.01.03.2.01.0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	15 unit	91.1300.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 unit	279.175.700
5.01.03.2.01.0008	Pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga	Kota Padang Panjang	Jumlah keluarga mengikuti pelatihan keluarag tanggap kebakaran rumah tangga	-	0	Pelatihan keluarga tanggap bencana	Kota Padang Panjang	Jumlah keluarga mengikuti pelatihan keluarag tanggap kebakaran rumah tangga	-	0
5.01.03.2.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Padang Panjang	Jumlah kegiatan pemberdayaan	2 kegiatan	105.239.500	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Padang Panjang	Jumlah kegiatan pemberdayaan	1 kegiatan	40.832.100
5.01.03.2.02.0008	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran tiap tahunnya	50 orang	60.008.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran tiap tahunnya	-	0

5.01.03.2.03	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Padang Panjang	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Kelahiran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	16 kelurahan	40.832.100	
5.01.03.2.03.0008	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kota Padang Panjang	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 Persen	13.621.500	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menyebabkan Keselamatan Manusia	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	5.259.000	
5.05.02	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan edukasi	Kota Padang Panjang	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan edukasi sesuai dengan standar teknis	1 unit	8.362.500	

1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	-	90 %	90 %	242.195.200,00	280.704.740,00	280.704.740,00	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	223.356.650,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
					Jumlah Paket Kompor Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4 Paket	3.162.000,00	2.715.400,00	4.287.300,00	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.356.650,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	23.966.700,00	14.739.340,00	23.828.940,00	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
					Jumlah Paket Buang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5 Paket	5 Paket	15.079.500,00	15.007.000,00	14.769.660,00	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15 Laporan	24 Laporan	199.987.000,00	248.243.000,00	99.830.440,00	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemertintah Daerah	Persentase Penentuan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		90 %	141.872.600,00	149.349.600,00	149.349.600,00	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	4 Unit	141.872.600,00	149.349.600,00	35.593.300,00	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		90 %	132.432.000,00	136.655.200,00	136.655.200,00	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	98.516.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Penyediaan Jasa Surat Menyurat															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08	0001	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.148.000,00	3.880.000,00	1.843.700,00	Kota Padang Panjang, Kecamatan n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatka n tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	35.384.000,00	35.384.000,00	19.867.240,00	Kota Padang Panjang, Kecamatan n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatka n tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	92.900.000,00	97.391.200,00	97.391.200,00	Semua Kota/Kab, Kecamatan n, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Kecamatan n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatka n tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis	93.516.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90 %	991.350.400,00	942.259.800,00	942.259.800,00			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	657.475.570,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	26 Unit	26 Unit	0,00	864.847.000,00	448.331.000,00	Kota Padang Panjang, Kecamatan n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatka n tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis	587.263.570,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1					NON URUSAN			11.973.657.998,00	12.367.084.245,00	11.484.539.832,00				8.921.977.195,00	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			11.973.657.998,00	12.367.084.245,00	11.484.539.832,00				8.921.977.195,00	
2	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 %	6.841.281.698,00	7.598.537.145,00	6.653.297.632,00				5.764.488.195,00	
					Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran										
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90 %	991.350.400,00	942.259.800,00	942.259.800,00			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	657.475.570,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
					Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah bertkondisi baik								Meningkatka n tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis		

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat										
1	05	04	2.04	0001	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			50 Orang	50 Orang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
								25.728.350,00	0,00	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran					
								40.786.800,00	40.832.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Keshanran Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		16 Desa/Kelurahan	40.786.800,00	40.832.100,00	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		100 %	84.424.250,00	84.424.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
										Bidang Pemadam Kebakaran dan Pertolongan Masyarakat
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia					
							12 Laporan	17.740.000,00	5.259.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia		12 Laporan	17.740.000,00	5.259.000,00	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evaluasi					
					Jumlah Sarana dan Peralatan yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evaluasi Sesuai dengan Standar Teknis		5 Unit	66.684.250,00	8.362.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
							1 Unit	12.367.084.245,00	11.484.559.832,00	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis
							J U M L A H	11.973.657.998,00	11.484.559.832,00	8.821.977.195,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang selama tahun 2025. Terlaksananya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Juni 2025

Kepala Satpol, PP dan Damkar
Kota Padang Panjang



BENNY, S STP.

Pembina Tk.I/ NIP. 19840402 1986021003